

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin dan Zainal Askin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ashofa, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Dwiyanto, Agus. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta.

Halim, Hamzah. Kemal Redindo. (2009). *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana Media Group.

Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang, Setara Pers.
-----.(2015). *Hukum Pemerintahan Desa “Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi”*. Malang: Setara Press.

Huda, Ni'matul dan Nazriyah. (2011). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung

Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaua Singkat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

-----). (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI PRESS.

Soemitro, Roni Hanitjo. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a. (2010). *Republik Desa: "Pergaulan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam desain Otonomi Desa"*. Bandung: PT. Alumni.

Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (2011). *Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Waluyo, Bambang. (1991). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, HAW. (2003). *"Pemerintahan Desa/Marga"*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No, 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- 6) Peraturan Daerah Demak No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

3. Jurnal

- Amalia Diamantina, “UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) Uud Nri Tahun 1945”. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, Halaman 33-40
- Ahadya, N. N., & Herawati, R. (2017). Tugas Kepala Desa Lerep Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1-17
- Arifin, M. Z., & MH, S. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. *Researchgate*, 1(1), 1-5.
- Desiana, A., & Yarni, M. (2014). Evaluasi Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi di Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 11(1), 43432
- Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah, *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa* Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol. 1, No. 5, Hal.890-899
- Nuriani, E. (2019). Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. *Tadulako Master Law Journal*, 3(2), 184-201
- Reka Apriyani, Abdul Sakban, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa CIVICUS: pendidikan-penelitian-pengabdian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, Vol 6 No, 2 2018 Hal 34-44

4. Wawancara

Rofik Anwar, *wawancara*, (Kepala Desa Guntur, 9 Maret 2021)